

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TUJUAN

- **Sebagai acuan bagi :**
 - Penyusun standar
 - Penyusun laporan keuangan
 - Pemeriksa
 - Para pengguna laporan

POSISI KERANGKA KONSEPTUAL

- Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi
- Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan dalam SAP
- Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya
 - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan
 - Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
 - Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan
 - adanya pengaruh proses politik
 - Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem.
 - b. Ciri keuangan pemerintah
 - Anggaran sbg pernyataan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian
 - Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan
 - Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

- Masyarakat;
- Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan
- Pemerintah.

ENTITAS PELAPORAN

- Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:
 - ✓ Pemerintah pusat;
 - ✓ Pemerintah daerah;
 - ✓ Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

- *Akuntabilitas*, mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan
- *Manajemen*, memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- *Transparansi*, memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders
- *Keseimbangan Antargenerasi*, memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

- Menyajikan info. yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

- Laporan Keuangan Pokok
- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Arus Kas
- Laporan Operasional
- Catatan atas Laporan Keuangan

ASUMSI DASAR

- Asumsi kemandirian entitas
- Asumsi kesinambungan entitas
- Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

- Relevan;
- Andal;
- Dapat dibandingkan; dan
- Dapat dipahami

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- Basis akuntansi;
- Prinsip nilai historis;
- Prinsip realisasi;
- Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- Prinsip periodisitas;
- Prinsip konsistensi;
- Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

- BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas;
- Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

“Cash towards Accrual”

PRINSIP NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)

- **Aset** dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
- **Kewajiban** dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang.
- **Nilai perolehan** lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

PRINSIP REALISASI

- Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial.

SUBSTANCE OVER FORM

- Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

PERIODISITAS

- Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan

KONSISTENSI

- Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal).
- Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.
- Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)

- Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
- Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)

- Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN

- MATERIALITAS
- PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT
- KESEIMBANGAN ANTAR KARKETRISTIK KUALITATIF

PENGAKUAN

- **Aset** diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal;
- **Kewajiban** diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul;
- **Pendapatan** diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan;
- **Belanja** diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

TERIMA KASIH